



**SUMBER BERITA**

**MINGGU, 14 OKTOBER 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Rehab Balai Adat, Rp 500 Juta**

**BENGKULU** - Meski sudah berdiri sejak tahun 2009 lalu, Gedung Balai Adat peninggalan mantan Walikota H. Ahmad Kanedi, SH, MH kondisinya makin memprihatinkan, hingga mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Pasalnya bangunan itu sudah menghabiskan total anggaran Rp 12 miliar, yang diambil dari APBD 2009 ditambah APBD 2011 serta anggaran perehaban tahun 2015 lalu sekitar Rp 400 juta juga pernah digelontorkan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu, Drs. Riduan, MSi mengungkapkan, gedung Balai Adat memang butuh perehaban total lagi lantaran melihat kondisi gedung saat ini juga sudah memprihatinkan. Menurutnya, meski sebelumnya hitungan sementara perehaban akan dianggarkan sebesar Rp 500 juta dalam rancangan APBD 2019 mendatang.

Namun pihaknya masih akan mengkaji dan menghitung keseluruhan lagi sembari menunggu hitungan keluarnya dana perimbangan dari APBN.

"Pak walikota dan wawali juga minta kita mengkaji dan menghitung keseluruhan lagi berapa total anggaran yang dibutuhkan perehaban total. Sebab bangunannya itu sudah rusak parah. Apalagi pak wali mengingatkan agar gedung itu jangan seperti sekedar gedung pertemuan saja. Akan tetapi ada ciri khas yang menarik lagi," terang Riduan.

Menurut Riduan, ketika semuanya sudah dilakukan perehaban total maka kemudian gedung Balai Adat harus difungsikan dengan menyerahkan tanggungjawab kepada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk dalam mengelola gedung tersebut.

"Sebab sejauh ini gedung tersebut belum dilakukan serah terima. Makanya belum bisa difungsikan betul

pengelolannya tersebut. Harapan kita setelah serah terima nanti, gedung itu akan terurus dengan baik," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Kota Heri Ifzan, SE meminta agar secepatnya Pemkot harus segera menyelamatkan aset gedung Balai Adat tersebut dengan segera memanfaatkan pengelolaannya dengan baik kepada pihak Badan Musyawarah Adat (BMA).

"Karena sudah bertahun-tahun lamanya gedung itu sudah dibangun. Sampai sekarang pengelolaannya tidak jelas. Artinya pemkot tidak becus mengurus balai adat itu. Sebab jangan sampai bangunan ini dibiarkan semraut dan mubazir saja. Apalagi kalau akan dianggarkan perehaban total, tentu banggar akan mengkaji lagi. Sebab jangan sampai kesannya nanti malah mubazir" kritik Heri.

Selain itu sambung Heri, bila dilihat kondisi saat ini kondisi bangunan makin memprihatinkan, padahal bangunan tersebut sudah sering dilakukan peremajaan gedung. Namun lantaran kondisinya tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang terjadi kondisi gedung terkesan semerawut.

"Harapan besar kita pemkot juga bisa mengambil sikap tegas dengan keberadaan gedung Balai Adat yang terkesan tak bertuan itu. Kalau memang pemkot kesulitan mengurusnya, serahkan saja pada pihak ketiga. Itu lebih profesional sehingga bisa menghasilkan PAD yang maksimal," terangnya.

Heri menyesalkan Pemerintah Kota yang tidak memanfaatkan bangunan yang telah dibangun dengan menghabiskan uang rakyat tersebut. Padahal bangunan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan hajatan adat dan sebagai macamnya.

"Kita heran juga kenapa tidak diserahkan oleh BMA (badan musyawarah adat). Kalau seperti ini jadinya, meski terus direhab namun tidak dimanfaatkan ya percuma. Yang ada seperti gedung mati suri tak terurus," ungkapnya. (new)